
Kemitraan Layanan Perikanan Perspektif Governance di TPI Wameo Kota Baubau

Ade Herwansyah^{1*}, Rasmuin², La Didi¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

² Pendidikan Matematika, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: herwansyahade2983@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 1 Maret 2024

Revised: 15 April 2024

Accepted: 30 April 2024

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi kemitraan layanan perikanan perspektif governance yaitu peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan perspektif governance di TPI Wameo Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu peran pemerintah dalam membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu regulator, fasilitator, pembinaan, dan pengawasan, walaupun terdapat keinginan besar pihak swasta ingin menguasai fasilitas TPI untuk di kelola oleh pihak ketiga, kedua kemitraan masyarakat nelayan dengan sektor swasta dan pemerintah dalam pelayanan sektor perikanan di TPI Wameo berjalan sesuai tugasnya masing-masing dan ketiga peran swasta dalam pelayanan sektor perikanan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan perikanan di Kota Baubau dan sekitarnya. Pihak swasta telah membantu masyarakat nelayan dalam memberikan fasilitas penampungan ikan, pengangkutan ikan, dan memfasilitasi modal dan pemeliharaan kapal nelayan.

Kata kunci: kemitraan, pemerintah, masyarakat dan swasta

Abstract

The research aims to describe and explore the partnership of fisheries services from a governance perspective, namely the role of the government, the private sector and the community in fisheries services from a governance perspective at TPI Wameo, Baubau City. The method used in the study is qualitative descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. The determination of informants uses the purposive sampling method. Data were collected by interviews, observations and documentation. The results of the study show that one role of the government in building partnerships with the private sector and the community in fisheries services works according to their main tasks and functions, namely regulators, facilitators, coaching, and supervision, although there is a great desire of the private sector to control TPI facilities to be managed by a third party, both partnerships between the fishing community and the private sector and the government in fisheries sector services at TPI Wameo are running according to their duties each and three private roles in fisheries sector services have made a positive contribution to fisheries services in Baubau City and its surroundings. The private sector has assisted the fishing community in providing fish shelter facilities, transporting fish, and facilitating capital and maintenance of fishing boats.

Keywords: *partnership, government, community and private*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kemitraan pemerintah dan swasta merupakan salah satu alternatif sistem manajemen yang dapat diterapkan karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta menjanjikan berbagai keuntungan bagi pihak pemerintah maupun swasta, (Kumorotomo 1999). Secara normatifnya dengan adanya kemitraan dapat terbangun pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam berbagai pelayanan sektor publik. Pada posisi ini kemitraan membangun hubungan antara 2 entitas adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran Pemerintah disini sebagai penyedia jasa pelayanan publik dan juga sebagai pemenuhan kebutuhan publik, disamping untuk memenuhi kebutuhan publik, pemerintah tidak selalu dapat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan publik oleh karena itu, agar tetap mampu melaksanakan kewajibannya, pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dan swasta untuk turut bekerjasama dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan bersama” (Anggraini 2017).

Pada dasarnya kemitraan terkadang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kerjasama antar pihak-pihak yang bermitra terkadang berjalan tidak sesuai dengan komitmen awal, (Domai 2010). Secara empiris kemitraan dalam pelayanan di Pelabuhan perikanan Wameo masih ditemukan masalah. Salah satu kendala adalah pengalihan status layanan dari daerah Kota ke daerah provinsi, sehingga rentan kendalanya semakin jauh, sehingga layanan tidak efisien dan efektif. Sekarang pengelolaan TPI dan pelabuhan sudah di ambil alih provinsi, sedangkan pemerintah Kota Baubau hanya mengambil alih proses retribusi pelelangan ikan. Adapun pengembangan pelabuhan di atur oleh provinsi, kecuali proyek-proyek pengembangan pelabuhan menggunakan jasa mitra kerja atau pihak ke tiga. Namun hingga saat ini untuk meningkatkan pelayanan, kemitraan belum pada tingkat keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan, masih sebatas rencana. Kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan pelabuhan ini berguna untuk masyarakat nelayan agar lebih mudah dalam mendaratkan kapal dan perahu agar ikannya di jual di TPI wameo.

Peran sektor swasta dalam pelayanan perikanan mulai dari menyiapkan penyimpanan hingga menyalurkan ikan yang telah disterilkan dalam *cold storage*. Selama ini pihak swasta baru sebatas menawarkan pembangunan cold storage dan pabrik es, sedangkan barang tersebut sangat penting untuk diadakan untuk memenuhi pasokan ikan dari masyarakat dan pengusaha. Selain itu sektor bisnis ikut menjual ikan yang telah proses *cold storage* dan dikirim kebeberapa Kota yaitu Kota Kendari, Kota Baubau, Surabaya dan Jakarta.

Masyarakat nelayan sebagai pihak yang bermitra akan mendapatkan penghasilan yang cukup dan kesejahteraannya pun meningkatkan. Pihak swasta dengan perannya sebagai produsen juga sebagai distributor ikan dapat memperoleh keuntungan dari Kerjasama tersebut. Sedangkan pemerintah mendapat keuntungan melalui pajak dan pelayanan masyarakat sebagai tugas utamanya dapat dilakukan. Oleh karena itu kemitraan penting untuk dilakukan oleh ketika aktor tersebut dalam pelayanan perikanan. Sebagaimana temuan (Jain 2010) bahwa kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat berhasil walaupun ada beberapa layanan yang tidak berhasil. Kemitraan penting dilakukan dalam rangka membangun ekonomi masyarakat lokal.

Dibutuhkan kerja sama beberapa pihak terlibat agar dapat mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu ketiga aktor dalam sinergisitas yang ada yaitu pemerintah (*public*), masyarakat (*community* atau *civil society* atau masyarakat madani) dan pihak swasta (*private*), Utomo (2007) dalam (Didi 2021). Partisipasi dari ketiga pihak yang terlibat itu merupakan manifestasi dari upaya untuk mewujudkan good governance melalui demokratisasi dalam memberikan pelayanan.

Ada tiga aktor kemitraan perspektif governance menurut (Sulistiani 2017) yaitu pemerintah berperan mengatur lebih banyak aturan main atau rambu-rambu secara umum terlihat dari menonjolnya pengambilan keputusan dan pendanaan. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menentukan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan (Sulistiani 2017).

Peran stakeholder menurut (Levy 2007) bahwa efektif perspektif governance yaitu“ menekankan pentingnya para aktor untuk menjalankan tanggung jawab sesuai wewenang yang diberikan kepada mereka. aktor dalam situasi ini adalah masyarakat, pemerintah, dan organisasi pemberi bantuan. Selain dari itu, semua tiga unsur tersebut berperan krusial dalam menjamin kesuksesan dalam memberikan layanan di sektor publik. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam merumuskan kebijakan, menetapkan kebijakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan, serta sebagai wadah untuk mengkoordinasikan semua itu.

Oleh karena itu peneliti menganggap perlu menelaah kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam layanan perikanan perspektif governance di TPI Wameo Kota Baubau. Pentingnya kemitraan untuk menciptakan sinergi yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Kemitraan tersebut terkait peran masing-masing yang bermitra dalam pelayanan publik khususnya terkait layanan sektor perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeskplorasi “kemitraan layanan perikanan perspektif governance di TPI Wameo Kota Baubau”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemitraan

Istilah kemitraan atau (*partnership*), secara etimologis berasal dari kata mitra (*partner*) yang diartikan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Selanjutnya istilah *partnership* diartikan sebagai persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka istilah “kemitraan dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik” (BP-PAUD dan DIKmas 2018).

Sedangkan menurut (Sulistiani 2017) Kemitraan berasal dari etimologi kata *partnership* dan dari kata *partner*. “Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu hubungan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan.” (Kurnianingsih 2022). Pada prinsipnya esensi dari kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*Labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi, (Unzizah 2019).

Kemitraan publik-swasta (KPS) didefinisikan sebagai kontrak antara sektor swasta dan publik untuk memberikan layanan kepada komunitas tertentu (Yescombe, 2007) dalam (Robson et al. 2022). Penggunaan kemitraan publik-swasta (PPP) telah berkembang pesat selama dua dekade terakhir, baik dalam jumlah proyek maupun total investasi di sebagian besar negara (Iossa and Martimort 2015) dalam (Rosell and Saz-Carranza 2020). Motif peningkatan KPS global ini berlipat ganda, tetapi pertimbangan keuangan tampaknya memainkan peran penting. KPS memungkinkan pemerintah untuk mengambil proyek-proyek populer yang seharusnya tidak terjangkau. Tekanan pada keuangan publik memainkan peran penting dalam adopsi KPS, karena negara-negara dengan utang atau defisit yang lebih tinggi akan cenderung menggunakan KPS lebih banyak daripada negara-negara lain, (Fleta-Asin, Muñoz, and Rosell-Martínez 2020).

Kemitraan, Menurut (Notoatmodjo 2003) adalah merupakan kerjasama formal antara kelompok, individu atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau target tertentu. Kemitraan, menurut Tennyson dalam (Kurnianingsih 2022) adalah perjanjian antara sektor dimana individu atau kelompok organisasi setuju bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan aktivitas tertentu, serta bersama-sama menanggung risiko maupun keuntungan, secara berkala meninjau ulang hubungan kerjasama.

Bentuk kemitraan.

Kemitraan tidak hanya sebatas Kerjasama pemerintah dan swasta melainkan banyak jenis kemitraan. Ada kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta yang biasa dikenal dengan *public private partnership* (PPP). Kemitraan pemerintahan dengan swasta muncul pertama kali dalam wacana manajemen publik pada awal 1980-an ketika sejumlah pengusaha besar pertemuan dengan para pejabat tinggi negara dalam sebuah forum penataran dan selanjutnya menghasilkan sebuah lembaga berbentuk yayasan yang disebut Prasetya Mulya, (Kumrotomo 1999). Kemitraan model PPP lebih pada dua Lembaga yang bekerjasama yaitu pemerintah dan swasta.

Berbagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta meliputi perjanjian kerja sama, proses lelang untuk pengadaan barang atau jasa, dan juga penerapan *business process outsourcing* (OECD, 1997) dalam (Abdullah 2020). Menurut OECD, negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan India dapat mengadopsi model kemitraan seperti: (1) perjanjian layanan (*service contract*); (2) perjanjian manajemen (*management contract*); (3) perjanjian sewa (*lease contract*); (4) bangun, kelola, alih milik (*Build, Operate and Transfer*); (5) bangun, kelola, miliki, alih milik (*Build, Operate Own, and Transfer*); dan (6) model konsesi (*concession*).

Peran pemerintah dalam kemitraan

Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam penyediaan pelayanan sektor publik, bersama dengan para pihak terkait lainnya seperti masyarakat dan LSM yang bertugas sebagai pendamping. Namun, menurut (Denhardt 2007), pemerintah memiliki beberapa peran penting dalam perspektif governance, yang meliputi: a) Pemerintah akan terus aktif dalam menetapkan aturan legal dan kebijakan yang akan mengatur penyelenggaraan berbagai jenis jaringan. Kemudian, pemerintah akan terus menerapkan prinsip-prinsip governance yang luas yang berlaku bagi semua orang secara konsisten. b) Kemungkinan besar pemerintah akan memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah distribusi sumber daya dan ketergantungan dalam beragam jaringan, terutama di antara jaringan-jaringan tersebut. Pemerintah akan memberikan dukungan untuk melindungi kepentingan ekonomi yang terlibat antara dua sektor. Pemerintah juga memiliki tugas untuk menyeimbangkan, bernegosiasi, dan memfasilitasi hubungan lintas batas jaringan, serta memastikan bahwa tidak ada sektor yang mendominasi sektor lainnya. c) Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap interaksi jaringan-jaringan agar prinsip demokrasi dan kesetaraan sosial tetap terjaga dalam hubungan antar jaringan khusus, baik antara dua jaringan maupun antara banyak jaringan yang berbeda.

Peran sektor swasta dalam kemitraan

Kemitraan pemerintah dan swasta dalam perspektif governance mengacu pada prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan perilaku etis menjadi bagian integral fungsi kemitraan (Loeffler and Bovaird 2021). Lebih lanjut setiawan mengatakan kerjasama pemerintah, swasta dan organisasi sosial adalah pengaturan di mana pemerintah sebagai *leadingsector*, swasta bertindak sebagai sumber investasi (pembiayaan), dan organisasi sosial menerima layanan public.

Peran Masyarakat dalam kemitraan

Governance terdiri dari tiga komponen pokok, yakni masyarakat, pemerintah, dan organisasi pemberi bantuan. Sesuai dengan pernyataan Levy (2007:4), bahwa; a) *In developing countries, society and companies use government governance measures to ensure that the government is accountable for its actions. The use of these measures is carried out at several levels, starting from the micro level to ensure the quality of public services and a good investment climate, to the aggregate level to ensure responsiveness government towards the interests of society in general. The purpose of using this measure is to ensure that state resources are used honestly at all levels of government.* (Di negara berkembang, masyarakat dan perusahaan menggunakan ukuran governance pemerintahan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. Pemakaian ukuran ini dilakukan dalam beberapa tingkat, mulai dari tingkat mikro untuk memastikan kualitas layanan publik dan iklim investasi yang baik, hingga tingkat agregat untuk memastikan respons pemerintah terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan penggunaan ukuran ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan dengan jujur pada semua tingkatan pemerintahan). b) *Governments in developing countries (and development partners who wish to provide technical assistance) have activities to use governance indicators to improve policy design, for example, by providing direction for implementation and improving governance.* Pemerintah di negara berkembang (dan mitra pembangunan yang ingin memberikan bantuan teknis) memiliki kegiatan menggunakan indicator governance untuk meningkatkan desain kebijakan, misalnya, dengan memberikan arahan untuk implementasi dan peningkatan governance. c) *(Donor agencies aim to ensure that the resources they donate will be utilized efficiently, not misused, and not wasted. Although governance is also vulnerable when development is hampered, resource providers need evidence that the system has improved. Donor agencies can use standards governance to compare conditions across countries (with a focus on a particular "level" at a particular time), or to track trends in individual countries).* (Lembaga donor bertujuan untuk memastikan bahwa sumberdaya yang mereka sumbangkan akan dimanfaatkan secara efisien, tidak disalahgunakan, dan tidak disia-siakan. Meskipun governance juga rentan ketika pembangunan terhambat, para penyedia sumber daya perlu bukti bahwa sistem telah mengalami perbaikan. Lembaga donor dapat menggunakan standar governance untuk membandingkan kondisi di berbagai negara (dengan fokus pada "level" tertentu pada waktu tertentu), atau untuk melacak kecenderungan di negara individu).

Governance

Istilah *governance* (tata kelola) begitu luas sehingga hampir tidak ada aspek dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dilihat dari perspektif *governance*. Menurut (Levy 2007) istilah "*governance*" sering digunakan sebagai kata pengganti yang lebih halus untuk korupsi. Selanjutnya (Sumarto 2003) konsep *governance* harus diartikan sebagai suatu proses, bukan hanya struktur atau institusi. Menurut Denhardt (2013), *governance* dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang mencakup tradisi, institusi, dan mekanisme yang mengatur penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini meliputi cara keputusan-keputusan dibuat berdasarkan isu-isu yang penting bagi masyarakat, serta peran warga negara diatur dalam proses pengambilan keputusan publik

Berdasarkan hal ini Christiansen, Andreas Follesdal, dan Simona Piattoni pada tahun 2003 seperti yang dikutip oleh Didi (2021a), bahwa: "*Governance is the result of authoritative decisions that are not decided by a single hierarchical structure such as a democratically elected government and parliament. Rather, governance emerges through the interaction of various public and private actors both collectively and individually. This shows that a democratically elected parliament and governments are incapable of gathering the information and controlling the resources necessary to make effective policies in modern society*" (*governance* merupakan hasil dari keputusan otoritatif yang tidak diputuskan oleh satu struktur hierarki tunggal seperti pemerintah dan parlemen yang dipilih secara demokratis. Melainkan, *governance* muncul melalui interaksi berbagai aktor publik dan swasta baik secara kolektif maupun individual. Ini menunjukkan bahwa parlemen yang dipilih secara demokratis dan pemerintah tidak mampu mengumpulkan informasi dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang efektif dalam masyarakat modern).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan menarasikan informasi yang diperoleh. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Baubau dengan lokus penelitian TPI Wameo. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut yaitu dikarenakan adanya pelayanan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan tiga strategi, yaitu persiapan dan organisasi data, reduksi data, dan penyajian data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam kemitraan

Sebagaimana temuan penelitian yang menunjukkan pemerintah dalam membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu regulator, fasilitator, pembinaan, dan pengawasan, walaupun terdapat keinginan besar pihak swasta ingin menguasai fasilitas TPI untuk di kelola oleh pihak ketiga

Peran pemerintah dalam kemitraan untuk jasa perikanan tidak secara eksplisit dibahas dalam makalah yang disediakan. Kemitraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari doktrin New Public Management, bertujuan untuk meningkatkan pemberian layanan publik melalui efisiensi dan efektivitas, yang dapat diterapkan pada layanan perikanan (Mahmudi, 2007). Faktor-faktor seperti keterlibatan individu dan kepedulian terhadap efisiensi secara positif mempengaruhi dukungan pegawai pemerintah untuk kemitraan publik-swasta (KPS), yang mungkin relevan bagi mereka yang terlibat dalam perikanan (Shakirova, 2017). Pembenaan ekonomi untuk KPS, termasuk di bidang perikanan, seringkali adalah efisiensi dan efektivitas biaya, dengan pemerintah bertindak sebagai pembeli daripada penyedia (Grout, 2003). Ada bentuk kerja sama yang kompleks antara negara dan aktor swasta dalam KPS, yang melebihi hubungan kontraktual tradisional dan beralih ke manajemen sektor publik strategis, yang berpotensi berlaku untuk layanan perikanan (Bovis, 2013).

Manajemen kolaboratif dan kemitraan di berbagai sektor, termasuk perikanan, dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan partisipasi pemangku kepentingan (Matsiliza, 2016). Sementara kemitraan dihargai untuk meningkatkan pemberian layanan, efektivitasnya dalam perikanan akan bergantung pada komitmen organisasi negara dan non-pemerintah (LSM) (Bano, 2018). Kebutuhan akan metode pembiayaan inovatif, seperti KPS, dapat menjadi relevan untuk proyek perikanan padat modal (Khan et al., 2012). Keterlibatan organisasi nirlaba dalam layanan publik, seperti yang terlihat di Korea Selatan, juga bisa

menjadi model untuk layanan perikanan (Jang & Kim, 2023). Peran sektor publik dalam memberikan layanan, termasuk perikanan, seringkali melibatkan kemitraan yang kompleks (Wakeman, 2016).

Akhirnya, pegawai negeri senior dapat berdampak positif pada kerjankemitraan dengan memfasilitasi komunikasi dan kepercayaan, yang dapat bermanfaat dalam konteks layanan perikanan (Guarneros-Meza & Martin, 2014). Singkatnya, meskipun makalah yang disediakan tidak secara langsung membahas peran pemerintah dalam kemitraan layanan perikanan, mereka menyarankan bahwa pemerintah dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan pemberian layanan melalui KPS, manajemen kolaboratif, dan pembiayaan inovatif. Efektivitas kemitraan semacam itu di sektor perikanan kemungkinan akan tergantung pada komitmen dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pegawai pemerintah, swasta, dan LSM.

Peran Masyarakat dalam kemitraan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan masyarakat nelayan dengan sektor swasta dan pemerintah dalam pelayanan sektor perikanan di TPI Wameo berjalan sesuai tugasnya masing-masing. Pemerintah dan pihak swasta sangat memahami kebutuhan masyarakat nelayan, sehingga disiapkan fasilitas penampungan ikan, membeli ikan, mengangkut, suplain hingga pemberian modal untuk melaut.

Konsep kemitraan masyarakat dalam pelayanan perikanan, atau "kemitraan masyarakat dalam pelayanan perikanan," adalah aspek penting dari pengelolaan perikanan berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perikanan dapat mengarah pada peningkatan hasil konservasi dan mendukung mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada penangkapan ikan (Utete et al., 2022). Keterlibatan ini berkisar dari penilaian lokal dan pemanfaatan sumber daya perikanan hingga partisipasi aktif dalam upaya konservasi dan pengaturan pengelolaan bersama (Schreiber, 2001). Menariknya, sementara partisipasi masyarakat umumnya dipandang bermanfaat, ada tantangan dan hambatan yang perlu ditangani. Misalnya, penegakan larangan penangkapan ikan yang ketat dan akses terbatas ke daerah-daerah tertentu dapat menghambat keterlibatan lokal (Utete et al., 2022), dan penekanan pada keterlibatan pemangku kepentingan dapat menjadi penghalang bagi partisipasi lokal (Mei, 2008).

Selain itu, keberhasilan praktik pengelolaan berbasis masyarakat, seperti kebangkitan kembali pembatasan tradisional di Kepulauan Pasifik, menunjukkan potensi untuk mengintegrasikan praktik budaya dan pendidikan dalam pengelolaan perikanan (Filous et al., 2020). Singkatnya, kemitraan masyarakat dalam layanan perikanan sangat penting untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Mereka dapat memberikan manfaat sosial ekonomi, mendukung upaya konservasi, dan meningkatkan ketahanan masyarakat nelayan. Namun, agar efektif, kemitraan ini harus menavigasi kompleksitas konteks lokal, mengatasi hambatan partisipasi, dan mengintegrasikan pengetahuan dan praktik tradisional jika sesuai. Literatur menggaris bawahi pentingnya melegitimasi akses dan hak masyarakat, menumbuhkan kepercayaan dan kolaborasi, dan memastikan bahwa pendekatan manajemen disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Filous et al., 2020; Schreiber, 2001; Utete et al., 2022).

Peran Swasta dalam kemitraaan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti peran swasta dalam pelayanan sektor perikanan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan perikanan di Kota Baubau dan sekitarnya. Pihak swasta telah membantu masyarakat nelayan dalam memberikan fasilitas penampungan ikan, pengangkutan ikan, dan memfasilitasi modal dan pemeliharaan kapal nelayan

Peran sektor swasta dalam berbagai kemitraan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Menurut literatur, keterlibatan sektor swasta dalam kemitraan publik-swasta (PPP) digembar-gemborkan untuk membawa keahlian investasi dan manajemen, yang dipandang penting untuk pembangunan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi (McIntyre, 2001). Peningkatan peran sektor swasta dalam memberikan layanan yang secara tradisional dikelola oleh sektor publik dibenarkan oleh potensi efisiensi dan efektivitas biaya yang lebih besar (Grout, 2003). Namun, keterlibatan ini bukan tanpa perselisihan atau tantangan. Menariknya, meskipun keterlibatan sektor swasta dalam KPS sering didorong secara ekonomi, namun juga bersinggungan dengan isu-isu sosial seperti kesetaraan gender.

Munculnya 'feminisme bisnis transnasional' dan agenda tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan bagaimana entitas swasta dapat berkontribusi pada tujuan

sosial, meskipun ini juga dapat berfungsi untuk meningkatkan citra perusahaan tanpa secara fundamental menantang kekuatan perusahaan (Calkin, 2015). Selain itu, potensi transformasional keterlibatan masyarakat dalam KPS infrastruktur perkotaan menunjukkan bahwa sektor swasta dapat berperan dalam tata kelola dan penciptaan nilai sosial, asalkan dinamika kekuasaan dikelola dengan hati-hati (Afieroho et al., 2023). Singkatnya, peran sektor swasta dalam kemitraan ditandai dengan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan efisiensi pemberian layanan. Namun, peran ini kompleks dan dapat meluas ke tata kelola sosial dan tanggung jawab, dengan implikasi untuk hubungan kekuasaan dan pengaruh perusahaan. Literatur menunjukkan manfaat dan tantangan keterlibatan sektor swasta dalam KPS, menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk dampak positif, pertimbangan dan pengelolaan kemitraan yang cermat sangat penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Peran pemerintah dalam membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu regulator, fasilitator, pembinaan, dan pengawasan, walaupun terdapat keinginan besar pihak swasta ingin menguasai fasilitas TPI untuk di kelola oleh pihak ketiga. 2) Peran masyarakat nelayan dengan sektor swasta dan pemerintah dalam pelayanan sektor perikanan di TPI Wameo berjalan sesuai tugasnya masing-masing. Pemerintah dan pihak swasta sangat memahami kebutuhan masyarakat nelayan, sehingga disiapkan fasilitas penampungan ikan, membeli ikan, mengakut, suplain hingga pemberian modal untuk melaut. 3) Peran swasta dalam pelayanan sektor perikanan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan perikanan di Kota Baubau dan sekitarnya. Pihak swasta telah membantu masyarakat nelayan dalam memberikan fasilitas penampungan ikan, pengangkutan ikan, dan memfasilitasi modal dan pemeliharaan kapal nelayan

Rekomendasi

Pemerintah agar meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat nelayan agar pelayanan perikanan berkualitas dan masyarakat nelayan dapat Sejahtera. Sedangkan pihak swasta dan masyarakat untuk membangun kemitraan dengan komitmen kuat sehingga berkontribusi terhadap piha-pihak yang bermitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Shintia. 2017. "Public Private Partnership Dalam Pengembangan Program Sidoarjo Bersih Dan Hijau Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Deskriptif Kemitraan Antara Radar Surabaya Dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Sidoarjo)." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5(April): 1–16.
- Bp-Paud Dan Dikmas. 2018. *Bahan Ajar Membangun Kemitraan*. Kalimantan Selatan: Bp-Paud Dan Dikmas.
- Denhardt, Janet V. Denhardt & Robert B. (Terjemahan Saut Pasaribu). 2007. *The New Public Service: Serving Ot Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Didi, La. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir (Pendekatan, Teori & Konsep)*. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa Tengah: Cv. Pena Persada.
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Kebijakan Kerjasama Antara Daerah Dalam Perspektif Sound Governance*. Surabaya: Jangala Pustaka Utama.
- Fleta-Asin, Jorge, Fernando Muñoz, And Jorge Rosell-Martínez. 2020. "Public-Private Partnerships: Determinants Of The Type Of Governance Structure." *Public Management Review* 22(10): 1489–1514.
- Jain, Aarushi. 2010. "Public Private Partnership In Social Sectors For Harmonized Development In India." *Oida International Journal Of Sustainable Development* 1(4): 29–37.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. "Kemitraan Usaha Sebagai Alternatif Dalam Pembiayaan Sektor Publik Di Daerah." *Jsp: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(1): 80–108.
- Kurnianingsih, Utari Sunia; Edison; & Fitria. 2022. "Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Tanjungpinang." *Publicness: Journal Of Public Administration Studies* 1(2): 92–102.

- Levy, Brian. 2007. *Governance Reform: Bridging Monitoring And Action*. Washington: The World Bank.
- Loeffler, Elke, And Tony Bovaird. 2021. *The Palgrave Handbook Of Co-Production Of Public Services And Outcomes*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robson, De Faria Silva; Et Al. 2022. "Public-Private Partnerships And Value For Money." *Public Works Management And Policy* 27(4): 347–70.
- Rosell, Jordi, And Angel Saz-Carranza. 2020. "Determinants Of Public-Private Partnership Policies." *Public Management Review* 22(8): 1171–90.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619816>.
- Sulistiani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Unzizah. 2019. "Model Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta Utara." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.